

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi yang mensyaratkan perlunya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, termasuk di bidang keuangan daerah. Seperti yang tertulis dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, berisi mengenai diterapkannya otonomi daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka terjadi perubahan yang cukup mendasar di dalam pengelolaan keuangan negara. Salah satu bentuk dari reformasi pengelolaan daerah dan implementasi dari otonomi daerah adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian disempurnakan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004, dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Halim, 2012:70)

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang tersebut, sehingga daerah cenderung bergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat guna memenuhi pembangunan daerah.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, yang mana menurut UU Nomor 33 tahun 2004 sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru, sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, memperdayakan masyarakat dan mengembangkan kehidupan demokrasi, dan memelihara hubungan yang serasi antara daerah dan pusat. Untuk membiayai kebutuhan daerah pendapatan asli daerah diharapkan menjadi penyangga utama.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya pajak hotel, Pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet.

Selain pajak daerah, retribusi merupakan komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman. Jenis retribusi jasa khusus yang terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi khusus parkir. jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi perekonomian yang cukup baik, hal itu terlihat dari sektor perkebunan, perindustrian, maupun pertanian serta sektor-sektor lain

nya di provinsi Sumatera Selatan yang dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Terdapat 6 sektor pertumbuhan ekonomi yang mempunyai andil besar seperti sektor pertanian, petambangan, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi. Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah yang cukup besar.

Realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam 15 tahun terakhir membuktikan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, begitu juga dengan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal sebenarnya untuk memiliki keuangan yang memadai, pemerintah daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan”**.

2.1 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan ?

3.1 Batasan Masalah

Batasan Permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001-2015
2. Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001-2015
3. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2001-2015

4.1 Tujuan & Manfaat Penelitian

4.1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengaruh Pajak Daerah & Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada provinsi sumatera selatan.

4.1.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah provinsi sumatera selatan untuk menambah jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan akuntansi politeknik negeri sriwijaya.